

Implementasi Kebijakan Kepmendiknas Nomor: 044/U/2002 tentang Peran dan Fungsi Komite Sekolah di SMA Muhammadiyah 1 Gresik

Nur Hidajati

Guru SMA Muhammadiyah 1 Gresik

e-mail: hidajatinur@gmail.com

Abstract: This research used a qualitative descriptive approach. From the analysis, it can be found that: 1) Senior High School of Muhammadiyah 1 Gresik has responded the policy on the school committee issued by the government since the determination of legislation. The activity manifested by this educational institution is the establishment of official decision about the organization structure of the school committee periodically. They are having AD/ART (The constitution and bylaws) of school committee; meetings conducted by the committee administrators with the principal, as well as a signatory on the letters of external aid. 2) The supporters of the policy implementation about school committee are the participation of society and parents as an educational resource. The constraint on the policy implementation of school committee is the similarity of editorial between the regulation of school committee and the Primary and Secondary Education Council of Muhammadiyah. 3) The solutions to solve the problems in the implementation on the policy of the school committee Senior High School of Muhammadiyah 1 Gresik is the involvement of the school committee on public relations activities

Keywords: policy, school committee

Abstrak: Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dari analisis didapatkan bahwa: 1) SMA Muhammadiyah 1 Gresik telah merespon kebijakan tentang komite sekolah yang dikeluarkan oleh pemerintah sejak ditetapkannya peraturan. Aktivitas yang diwujudkan oleh lembaga pendidikan tersebut adalah penetapan surat keputusan tentang struktur organisasi komite sekolah secara berkala; memiliki AD/ART komite sekolah; adanya pertemuan pertemuan yang dilakukan oleh pengurus komite dengan kepala sekolah; serta penandatanganan surat surat pemberian bantuan dari pihak eksternal; 2) pendukung implementasi kebijakan tentang komite sekolah adalah partisipasi masyarakat dan orang tua sebagai sumber daya pendidikan dan kendala implementasi kebijakan tentang komite sekolah adalah adanya kesamaan redaksi antara peraturan komite sekolah dan Majelis Dikdasmen Muhammadiyah; 3) Solusi untuk mengatasi permasalahan implementasi kebijakan komite sekolah di SMA Muhammadiyah 1 Gresik adalah pelibatan komite sekolah pada kegiatan bidang kerja kehumasan.

Kata kunci: kebijakan, komite sekolah

Muhammadiyah adalah organisasi kemasyarakatan yang memiliki tujuan mengembangkan dakwah ke masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk amal usaha yang meliputi sekolah, rumah sakit, panti asuhan dan lain-lain. Usaha mendapatkan kesempatan pendidikan sebagaimana harapan masyarakat telah disikapi organisasi Muhammadiyah dengan menyelenggarakan pendidikan dalam rangka ikut bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tujuan nasional. Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah namun juga menjadi tanggung jawab keluarga dan masyarakat. Masyarakat adalah stakeholder pendidikan yang memiliki kepentingan terhadap kemajuan pendidikan. Keterlibatan masyarakat terhadap bidang pendidikan merupakan konsekuensi atas lahirnya undang-undang tentang otonomi daerah yang mengamankan pemerintah mendorong tumbuhnya kepedulian masyarakat terhadap pembangunan di segala bidang termasuk program pembangunan dalam bidang pendidikan.

UU Nomer 25 Tahun 2000 tentang Proptenas (Program Pembangunan Nasional) menyatakan bahwa ada tiga tantangan besar dalam pendidikan di Indonesia, yaitu: 1) mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai; 2) mempersiapkan SDM yang kompeten dan mampu bersaing dalam pasar kerja global; 3) sistem pendidikan nasional dituntut untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memerhatikan keragaman, memerhatikan kebutuhan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat. Upaya perwujudan aktualisasi peran masyarakat di SMA Muhammadiyah 1 Gresik

dibentuklah Komite Sekolah sebagai suatu badan yang mengganti keberadaan Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3) atau yang di kalangan sekolah sekolah Muhammadiyah dikenal dengan nama Ikhwan. Pembentukan Komite Sekolah di SMA Muhammadiyah 1 Gresik dilaksanakan dalam rangka melaksanakan amanah undang-undang sekaligus sesuai dengan surat keputusan Majelis Dikdasmen Pusat tentang Komite Sekolah/ Madrasah Muhammadiyah dengan dasar pemikiran bahwa penyelenggaraan pendidikan memerlukan dukungan masyarakat secara memadai dengan menumbuhkan keberpihakan berbasis mutu.

Sebagai lembaga pendidikan yang berada dibawah naungan Organisasi Muhammadiyah, secara struktural kelembagaan sekolah SMA Muhammadiyah 1 Gresik menjadi kewenangan Majelis Dikdasmen. Keberadaan Komite Sekolah di tiap tingkat Satuan Pendidikan merupakan upaya perwujudan semangat reformasi di bidang pendidikan serta menumbuhkan prinsip manajemen modern dalam pengelolaan pendidikan yang meliputi prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan demokrasi. Komite Sekolah sebagai representasi peran serta masyarakat terhadap bidang pendidikan merupakan lembaga yang memiliki fungsi peningkatan mutu pelayanan pendidikan dalam pengelolaan dengan memberikan pertimbangan, dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan di tingkat satuan pendidikan sedangkan Majelis Dikdasmen Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat penyelenggara pendidikan berfungsi memperbaiki akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola, akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena: 1) latar penelitian ini adalah alamiah; 2) peneliti sebagai instrumen penelitian, dan 3) rancangan penelitiannya berkembang sesuai dengan perkembangan yang terjadi dalam latar penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian yang dilakukan penulis adalah studi kasus artinya tidak diarahkan pada kesimpulan untuk membuktikan suatu hipotesis ditolak atau diterima, dan tidak menguji hubungan antar variabel, tetapi lebih ditekankan pada pengumpulan data untuk mendeskripsikan keadaan sesungguhnya yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi. Peneliti fenomenologis merumuskan suatu pertanyaan yang kemudian dianalisis berdasarkan pada pertanyaan “persepsi” partisipan mengenai fenomena yang sedang diteliti. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meminta partisipan untuk mengungkap persepsi mereka tentang fenomena (Dempsey, 2002)

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Muhammadiyah 1 Gresik. Waktu pelaksanaannya berkisar antara semester Ganjil Tahun 2013, dengan obyek penelitian adalah Ketua dan sekretaris Majelis Dikdasmen Kabupaten Gresik; Kepala sekolah; Wakil kepala sekolah urusan Hubungan Masyarakat, Koordinator Kepegawaian, Koordinator Keuangan, Ketua Komite Sekolah dan Anggota Komite Sekolah serta dokumen yang terkait Komite Sekolah

Hasil Penelitian

Implementasi Kepmendiknas Nomor : 044/U/2002 Tentang Komite Sekolah di SMA Muhammadiyah 1 Gresik

Keberadaan komite sekolah di SMA Muhammadiyah 1 Gresik ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah Muhammadiyah 1 Gresik Nomor: 310/KEP /III.4.AU/A/2012 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengurus Komite Sekolah SMA Muhammadiyah 1 Gresik Periode tahun 2012 – 2015. Dasar Hukum yang menjadi landasan penetapan komite sekolah SMA Muhammadiyah 1 Gresik adalah: 1). Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 044/U/2002; 2). Program Kerja SMA 1 Muhammadiyah 1 Gresik Tahun 2012/2013. Susunan pengurus komite sekolah periode 2012/2015 terdiri: Ketua; sekretaris; serta anggota yang terdiri empat belas orang. Berdasarkan jenjang pendidikan yang dilalui, pengurus komite sekolah saat ini merupakan para orang tua peserta didik yang memiliki jenjang pendidikan yang beragam mulai dari lulusan SMA sampai lulusan S2 yang masing masing memiliki profesi sebagai guru, dosen, maupun karyawan.

Komite Sekolah SMA Muhammadiyah 1 Gresik memiliki perangkat pedoman untuk menjalankan organisasi secara operasional. Selain itu juga mengatur mekanisme pembentukan pengurus komite sekolah. Menurut Gamage & Pang (2003) “ kebijakan pendidikan dapat dipahami sebagai perangkat panduan yang memberi kerangka kerja bagi tindakan dalam hubungan dengan persoalan substansif”

Hal hal yang dilaksanakan komite sekolah di SMA Muhammadiyah 1 Gresik adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh komite sekolah di SMA Muhammadiyah 1 Gresik saat ini bersifat insidental artinya pengurus komite sekolah lebih bersifat pasif dan menunggu koordinasi dan komunikasi dengan pihak sekolah lebih dahulu. Sampai saat ini Komite Sekolah belum menetapkan program kerja.
2. Hubungan komite sekolah dengan pihak sekolah selama ini dilakukan melalui bidang kehumasan Komite Sekolah yang terbentuk di SMA Muhammadiyah 1 Gresik melaksanakan kegiatan berdasarkan agenda yang ditetapkan oleh bidang Humas. Sosialisasi keberadaan komite sekolah di SMA Muhammadiyah dilakukan pada kalangan terbatas pimpinan sekolah dan pengurus komite sekolah.
3. Terbentuknya susunan pengurus komite sekolah saat ini dilakukan melalui forum yang ditetapkan pimpinan sekolah. Komite sekolah diangkat oleh kepala sekolah dengan masa bakti sekarang kurangnya dua tahun dan paling lama tiga tahun. Berdasarkan jenjang pendidikan yang dilalui, pengurus komite sekolah saat ini merupakan para orang tua peserta didik yang memiliki jenjang pendidikan yang beragam mulai dari lulusan SMA sampai lulusan S2 yang masing masing memiliki profesi sebagai guru, dosen, maupun karyawan.

Pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Kepmendiknas Nomor: 044/U/2002 tentang Komite Sekolah di SMA Muhammadiyah 1 Gresik.

Sistem pendidikan dilingkungan sekolah SMA Muhammadiyah 1 Gresik sudah menganut konsep manajemen modern. Lembaga SMA Muhammadiyah 1 Gresik menerapkan tata kelola bidang pendidikan berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh organisasi Muhammadiyah yang memiliki spirit sebagai organisasi pembaharu. Sebagai lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat, SMA Muhammadiyah 1 Gresik memiliki kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat. Otoritas pengelolaan organisasi sekolah SMA Muhammadiyah 1 Gresik tidak lepas dari kebijakan pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah maupun perubahan perubahan yang terjadi di masyarakat.

Hal hal yang menjadi daya dukung implementasi Kepmendiknas nomer 044/U/2002 di SMA Muhammadiyah:

1. Kepercayaan masyarakat Gresik dan sekitarnya untuk menyekolahkan putra putrinya di sekolah ini merupakan potensi sumber daya pendidikan di SMA Muhammadiyah 1 Gresik yang mampu mendorong terlaksanakannya indikator visi misi sekolah kedalam setiap program sekolah secara optimal.
2. Besarnya jumlah peserta didik yang ada di dalam lembaga pendidikan akan memperbesar kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh lembaga sekolah sehingga lebih besar pula membutuhkan kerja sama dengan para orang tua dan masyarakat
3. Jumlah peserta didik yang besar menjadikan lembaga sekolah memiliki harapan lebih besar melakukan pilihan terhadap para orangtua yang dianggap memiliki kompetensi di dalam kepengurusan komite sekolah.

Hal hal yang menjadi kendala kendala implementasi Kepmendiknas nomer 044/U/2002 di SMA Muhammadiyah:

1. Substansi kebijakan komite sekolah yang tumpang tindih dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Majelis dikdasmen menjadi kendala dalam implementasi kebijakan. Kebijakan yang ditetapkan oleh dua lembaga yang posisinya berbeda, satu sisi Majelis Dikdasmen merupakan organisasi penyelenggara pendidikan sedangkan disisi yang lain komite sekolah adalah lembaga yang mewakili *customer* sebagai pengguna jasa pendidikan.
2. Komite sekolah tidak memiliki perencanaan penyelenggaraan pertemuan secara berkala dan rutin. Substansi pertemuan komite sekolah masih terbatas pada kegiatan kegiatan yang membutuhkan partisipasi komite sekolah yang terkait dengan pembangunan/renovasi gedung, proses pembelajaran peserta didik, serta hal hal yang bersifat insidental.

Solusi Permasalahan Implementasi Kebijakan Komite Sekolah Di SMA Muhammadiyah 1 Gresik:

Untuk memenuhi kapasitas sebagai perwakilan orang tua dan masyarakat, maka solusi yang dilakukan

1. Proses pemilihan pengurus komite sekolah diselenggarakan berdasarkan inisiatif pihak sekolah dan menjadi bagian dari program sekolah bagian Humas. Hal ini dilakukan selain untuk menghindari kekosongan jabatan pengurus komite sekolah, juga diharapkan pengurus komite sekolah yang terpilih paham terhadap AD/ART serta peraturan-peraturan tentang penyelenggaraan pendidikan yang ditetapkan oleh Muhammadiyah.
2. Memilih tokoh-tokoh dan simpatisan Muhammadiyah untuk menjadi pengurus/anggota komite sekolah
3. Masing-masing pengurus Komite sekolah dipilih berdasarkan kemampuan memahami Tupoksi yang ditetapkan sekolah
4. Sekolah menginformasikan kepada komite sekolah tentang program kerja tahunan agar terjadi kesesuaian antara rencana program komite sekolah dengan program sekolah
5. Pimpinan sekolah menggali informasi tentang peran dan fungsi komite sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Memberi ruang gerak pada komite sekolah untuk menjalankan peran dan fungsi sesuai peraturan

Pembahasan

Implementasi Komite Sekolah di SMA Muhammadiyah 1 Gresik

Penyelenggaraan pendidikan di tingkat nasional maupun daerah mengalami suatu perubahan yang sangat signifikan dalam pengelolaan sumber-sumber daya yang memiliki peran penting dalam keberhasilan institusi pendidikan. Tuntutan perubahan telah mendorong pelaksanaan pendidikan melakukan peningkatan peran sumber-sumber daya pendidikan dengan segala upaya agar kelangsungan pendidikan terus terjaga. Sumber daya yang dimaksud seperti tercantum dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 23: "Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana".

Implementasi kebijakan tentang komite sekolah di SMA Muhammadiyah 1 Gresik dapat tercermin dari produktivitas yang terkait dengan kepentingan peserta didik sehingga bisa wujudkan dalam aktivitas penyelenggaraan pendidikan di lembaga tersebut. Indikasi dari hal ini bisa diuraikan sebagai berikut:

1. Komunikasi
Setiap kebijakan yang ditetapkan dalam tahap pelaksanaannya akan menemui hambatan dan juga sekaligus dukungan atau respon positif. Dalam hal ini komunikasi sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan implementasi kebijakan publik.
2. Proses Penetapan Pengurus Komite Sekolah
Kebijakan apapun selalu dimaksudkan untuk mencapai sasaran tertentu. Pencapaian sasaran melalui penetapan kebijakan tertentu diperlukan serangkaian aktivitas yang meliputi langkah-langkah yang sudah tersusun dengan konsep yang matang (Higgins, 1985). Lahirnya kebijakan tentang komite sekolah yang telah disikapi oleh SMA Muhammadiyah 1 Gresik dengan menetapkan AD/ART sebagai acuan operasional organisasi tersebut belum ditunjang oleh langkah-langkah yang sesuai dengan prosedur. Penetapan pengurus komite sekolah tidak didasarkan pada pemilihan yang bersifat demokratis yaitu tidak melalui pemungutan suara tetapi melalui penunjukan oleh pimpinan sekolah
3. Keterlibatan Komite Sekolah Dalam Kegiatan Sekolah
Secara struktural yang digambarkan dalam bagan organisasi sekolah SMA Muhammadiyah 1 Gresik, antara komite sekolah dan majelis dikasmen tidak memiliki hubungan secara langsung.

Pendukung dan penghambat implementasi kebijakan tentang Komite Sekolah di SMA Muhammadiyah 1 Gresik.

Peserta didik di dalam suatu lembaga sekolah merupakan aset masa depan yang akan menjadi modal dasar dalam pembangunan masa depan bangsa dan negara. Setiap peserta didik memiliki kompetensi yang berbeda-beda satu dengan yang lain karena itu mereka membutuhkan pelayanan pendidikan yang berbeda-beda sesuai kebutuhan masing-masing. Kebutuhan peserta didik terhadap pelayanan

pendidikan yang bersifat akademik maupun non akademik yang mampu terlayani oleh lembaga pendidikan sesuai standar mutu pendidikan merupakan harapan orangtua dan masyarakat, sebaliknya keterlibatan orangtua dan masyarakat dalam menjaga mutu standar pendidikan yang dibutuhkan akan menjadikan lembaga sekolah sebagai organisasi yang unggul. (Edward, 2010)

Selama ini keterlibatan komite sekolah dalam kapasitas sebagai pendukung yang menunjang keberhasilan lomba lomba eksternal yang diselenggarakan lembaga perguruan tinggi atau instansi di luar pendidikan dengan jalan mengundang para orang tua untuk berkomunikasi dalam rangka mengantarkan peserta didik meraih kejuaaraan dengan membawa nama orang tua maupun sekolah.

Substansi kebijakan komite sekolah yang tumpang tindih dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Majelis dikdasmen merupakan kendala dalam implementasi kebijakan. Kebijakan yang ditetapkan oleh dua lembaga yang posisinya berbeda, satu sisi merupakan organisasi penyelenggara pendidikan sedangkan disisi yang lain adalah lembaga yang mewakili *customer*. Dalam kaitannya dengan peran pengawasan yang bisa dilakukan oleh dua pihak justru menimbulkan kemandegan dalam peran dan fungsi pengawasan di pihak karena tidak ada jaminan konsekwensi yang tegas. Lemahnya konsekwensi yang ditetapkan dalam peraturan makin memperlemah peran dan fungsi komite sekolah dalam kiprahnya

Solusi dalam menghadapi kendala implementasi Kepmendiknas Nomer: 044/U/2002

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Majelis Dikdasmen dalam rangka mengatasi permasalahan yang terkait dengan tumpang tindih peran dan fungsi komite sekolah dan Majelis dikdasmen adalah dengan menetapkan pembatasan fungsi kontrol majelis dan komite sekolah sebagai berikut

1. Fungsi pengawasan Majelis Dikdasmen dititik beratkan pada pencapaian keluaran penyelenggaraan pendidikan Muhammadiyah dikaitkan dengan tujuan pendidikan Muhammadiyah, sedangkan peran dan fungsi pengawasan komite sekolah dititik beratkan pada keluaran satuan pendidikan yang sesuai dengan target sekolah.
2. Membagi tugas masing-masing komponen sekolah melalui forum rapat koordinasi yang dilakukan oleh majelis dikdasmen, pimpinan sekolah maupun komite sekolah.

Simpulan

1. SMA Muhammadiyah 1 Gresik telah merespon dengan baik kebijakan tentang komite sekolah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Aktivitas yang diwujudkan oleh lembaga pendidikan tersebut adalah dengan menetapkan surat keputusan tentang struktur organisasi komite sekolah; memiliki AD/ART/ komite sekolah; adanya pertemuan pertemuan yang dilakukan oleh pengurus komite dengan kepala sekolah; serta penandatanganan surat surat yang terkait dengan pemberian bantuan pada siswa miskin dan Bantuan Operasional Sekolah.
2. Pendukung implementasi kebijakan tentang komite sekolah adalah partisipasi masyarakat dan orang tua sebagai sumber daya pendidikan yang memiliki potensi pengembangan tujuan pendidikan dan kendala implementasi kebijakan tentang komite sekolah adalah adanya kesamaan redaksi antara peraturan komite sekolah dan Majelis Dikdasmen Muhammadiyah yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih dalam peran dan fungsi kedua lembaga tersebut.
3. Solusi untuk mengatasi permasalahan terjadinya tumpang tindih peran dan fungsi komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan di SMA Muhammadiyah 1 Gresik adalah pelibatan komite sekolah pada kegiatan kegiatan bersifat teknis yang terintegrasi dalam bidang kerja kehumasan.

Saran

1. Merekomendasikan kepada majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah menerbitkan buku pedoman tentang komite sekolah/ madrasah Muhammadiyah sebagai acuan operasional yang digunakan lembaga lembaga pendidikan Muhammadiyah untuk melaksanakan kebijakan tentang komite sekolah/ madrasah
2. Merekomendasikan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Dikdasmen untuk menerbitkan silabus *capacity building* bagi pengurus komite sekolah di sekolah sekolah Muhammadiyah
3. Merekomendasikan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Dikdasmen untuk merevisi redaksi peraturan tentang peran dan fungsi Majelis Dikdasmen agar tidak terjadi tumpang tindih dengan peran dan fungsi komite sekolah

4. Hendaknya ada pembagian tugas secara tegas dan jelas antara peran dan fungsi majelis dikkasmen, pimpinan sekolah dan komite sekolah dalam pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan sekolah Muhammadiyah sebagai solusi untuk mengatasi kendala dalam implementasi kebijakan komite sekolah.

Rujukan

- Budi Winarno, (2005), *Kebijakan Publik Teori & Proses*, Yogyakarta: Media Pressindo.
- Depdiknas Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah (2003), *Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional
- Dunn, William N, (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UGM.
- Ino Sutisno Rawita, (2010), *Kebijakan Pendidikan. Teori, Implementasi, dan Monev*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta
- Isjoni, (2006), *Membangun Visi Bersama Aspek Aspek Penting dalam Reformasi Pendidikan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- John M Ivanchevic, Robert Konopaske, Michael T Matteson, (2007) *Perilaku dan Manajemen Organisasi*, Jakarta: Erlangga
- Moleong, (2010), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung:Remaja Rosda Karya.
- Riant Nugroho Dwidjowijoto, (2003). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta, Kelompok Gramedia
- Riant Nugroho Dwidjowijoto, (2006) *Kebijakan Publik Untuk Negara-negara Berkembang*, Jakarta: Kelompok Gramedia
- Salusu, (1997) *Pengambilan Keputusan Strategik*, cet ke 1, Jakarta:Grasindo
- Samodra Wibawa, (2010). *Politik Perumusan Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sarwono, (2006) *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuanyitatif dan Kualitatif*, Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono, (2008) *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R & D)*, Cet ke 6, Bandung: CV Alfabeta